

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memegang peranan penting dalam kemajuan perekonomian negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa pemerintah perlu mendirikan lembaga mikro di wilayah desa yang dapat membantu dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang digunakan oleh masyarakat untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat. Hasil usaha BUMDes dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa seperti, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan kepada masyarakat melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberadaan BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjelaskan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja sebagai jawaban atas kebutuhan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fitri (dalam Irawan et al., 2022). Perkembangan keberadaan BUMDes di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berikut data yang menunjukkan jumlah BUMDes di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Data Jumlah BUMDes di Indonesia

No	Tahun	Jumlah BUMDes
1.	2014	1.022
2.	2015	12.115
3.	2016	18.446
4.	2017	39.149
5.	2018	45.549
6.	2019	50.199
7.	2020	51.134
8.	2021	57.273

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa keberadaan jumlah BUMDes di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah BUMDes di Indonesia tahun 2014 berjumlah 1.022 unit, tahun 2015 meningkat menjadi 12.115 unit, tahun 2016 meningkat menjadi 18.446 unit, tahun 2017 meningkat menjadi 39.149 unit, tahun 2018 menjadi 45.549 unit, tahun 2019 meningkat menjadi 50.199 unit, tahun 2020 meningkat menjadi 51.134 unit dan hingga akhir tahun 2021 meningkat menjadi 57.273 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali desa di Indonesia yang mendorong dan mendirikan BUMDes di sepanjang tahun 2014 sampai akhir tahun 2021.

Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi yang juga memiliki perkembangan BUMDes yang sangat pesat. Hal ini dapat diketahui bahwa pada saat ini jumlah BUMDes di Bali sudah mencapai 612 BUMDes daripada tahun sebelumnya yaitu hanya ada 545 BUMDes dari jumlah desa sebanyak 636 Desa. Keberadaan BUMDes di Provinsi Bali tersebar pada 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 2
Jumlah BUMDes Serta Persentase setiap Kabupaten
di Provinsi Bali Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes (Unit)	Persentase
1.	Jembrana	41	41	100%
2.	Tabanan	133	127	95%
3.	Badung	46	46	100%
4.	Denpasar	27	26	96%
5.	Klungkung	53	48	90%
6.	Bangli	68	64	94%
7.	Karangasem	75	73	97%
8.	Buleleng	129	126	98%
9.	Gianyar	64	61	95%
Total		636	612	-

Sumber:
Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 636 desa yang ada di Bali, sebanyak 612 desa diantaranya sudah memiliki BUMDes dan artinya masih terdapat sebanyak 24 desa yang belum memiliki BUMDes. Selain itu dapat diketahui pula bahwa hanya Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung yang telah memiliki BUMDes secara keseluruhan daripada kabupaten lainnya.

Jembrana merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, keberadaan BUMDes di Jembrana mengalami perkembangan yang pesat. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali menunjukkan bahwa tercatat pada tahun 2017 Kabupaten Jembrana sudah memiliki unit BUMDes secara keseluruhan yakni sebanyak 41 unit BUMDes dari 41 desa daripada Denpasar dengan jumlah 27 desa. Maka berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah pertama di Bali yang memiliki BUMDes secara keseluruhan daripada Kabupaten lainnya. Keberadaan BUMDes di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 3
Jumlah BUMDes di Kabupaten Jembrana

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1.	Melaya	9
2.	Negara	8
3.	Jembrana	6
4.	Mendoyo	10
5.	Pekutatan	8
	Total	41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa keberadaan BUMDes di Kabupaten Jembrana terdapat pada 5 Kecamatan, yaitu di Kecamatan Melaya terdapat 9 unit BUMDes, Kecamatan Negara terdapat 8 unit BUMDes, Kecamatan Jembrana terdapat 6 BUMDes, Kecamatan Mendoyo terdapat 10 unit BUMDes dan Kecamatan Pekutatan terdapat 8 unit BUMDes.

Dalam BUMDes dikenal Alokasi Dana Desa yang merupakan dana yang yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa. Sumber dana ini adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota (Pranoto, 2020). Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk diberikan kepada desa (Julianto & Dewi, 2019). Tahun 2021 Kabupaten Jembrana memperoleh penghargaan sebagai daerah penyalur dana desa tahap I tercepat di Bali dan salah satu arah kebijakan dana desa tersebut yaitu penggunaan dana desa diprioritaskan untuk program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan perdesaan melalui peningkatan peran BUMDes.

Seperti yang kita ketahui umumnya BUMDes berperan dalam mendorong dan meningkatkan perekonomian desa serta berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun fenomenanya, keberadaan BUMDes di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Jembrana pada khususnya belum dapat memberikan manfaatnya dengan baik

kepada masyarakat secara maksimal. Dilansir dari berita oleh (Asmara, 2021) keberadaan BUMDes secara statistik terus bertambah namun, secara kualitas dalam berkontribusi untuk masyarakat desa harus ditinjau kembali. Salah satu faktor yang menyebabkan BUMDes sulit berkembang yaitu lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal pengelolaan usaha BUMDes.

Hal tersebut sejalan dengan fenomena BUMDes di Jembrana, dimana berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan pada saat observasi awal, yakni keberadaan BUMDes di Jembrana yang di dukung berbagai kebijakan yang memayungi BUMDes Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa sampai saat ini kinerja BUMDes masih belum optimal. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, bahwa sejak awal berdirinya pengelolaan program BUMDes sudah mampu berjalan dengan baik akan tetapi masih terdapat beberapa BUMDes yang tidak dapat menjalankan program maupun pemanfaatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian seiring berjalannya, sampai saat ini diketahui kondisi BUMDes di Jembrana yaitu hanya terdapat sebanyak 10% BUMDes dari jumlah 41 BUMDes masih berjalan dengan baik sedangkan sisanya ada yang tidak berjalan atau bahkan ada yang masih berjalan namun tidak dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan pendiriannya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu BUMDes di Jembrana yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam mengalami keracunan dalam pengelolaan keuangannya, dikarenakan para nasabah dari BUMDes tersebut tidak dapat menarik tabungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes di Jembrana perlu menumbuhkan transparansi mengenai kondisi BUMDes terutama yang terkait mengenai kinerja keuangan. Berikut ini data yang dapat menunjukkan kondisi terkini kesehatan BUMDes di Jembrana yaitu

Tabel 1. 4
Data Kondisi BUMDes Kabupaten Jembrana
Tahun 2020-2021

No	Keterangan	Persentase (%)
1	Terbaik	10%
2	Berkembang	12%
3	Cukup berkembang	12%
4	Kurang berkembang	29%
5	Bermasalah	37%
Total		100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari sebanyak 41 unit BUMDes yang ada di Kabupaten Jembrana, terdapat sebesar 37% diantaranya bermasalah, 29% kurang berkembang, kondisi cukup berkembang dan berkembang masing-masing 12% dan terbaik 10%. Keberadaan BUMDes secara keseluruhan serta adanya dorongan pemerintah melalui prioritas kebijakan dana desa yang ditujukan ke BUMDes, namun juga diiringi dengan banyaknya jumlah BUMDes yang kondisinya tidak sehat atau bermasalah tentu menjadi suatu permasalahan. Hal ini dikarenakan dengan adanya prioritas dana yang ditujukan ke BUMDes seharusnya lebih mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga akan dapat memberikan kontribusi secara maksimal dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa karena tersedianya modal usaha pada kegiatan pengembangan usaha BUMDes.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana bagian BUMDes yaitu Bapak I Kadek Sudiarta, S.Kom, yang dilakukan pada 14 April 2022, mengatakan bahwa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes di Jembrana sampai saat ini yaitu terkait dengan kinerja keuangan BUMDes yang kurang baik, yaitu dalam memperoleh laba usaha yang dijalankan oleh BUMDes mengalami peningkatan dan penurunan laba usaha sehingga hasil kegiatan usaha pada BUMDes belum mampu memberikan kontribusi dan manfaat dalam kesejahteraan bagi

masyarakat desa. Dimana hal itu terjadi disebabkan oleh masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh pelaku BUMDes seperti, tingkat pemahaman sistem akuntansi yang masih kurang, kurangnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan struktur modal BUMDes, serta efektivitas kerja karyawan yang masih rendah. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dari beberapa BUMDes di Jembrana yang juga mengungkapkan bahwa beberapa hambatan yang dihadapi terkait kinerja keuangan BUMDes yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes seperti pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, struktur modal serta terdapat beberapa pelaku BUMDes yang memiliki kualitas kerja yang kurang baik.

Dalam melaksanakan kegiatannya agar tetap berjalan, BUMDes perlu strategi pengelolaan yang tepat untuk membangun perekonomian desa secara berkelanjutan. Maka pemahaman yang baik mengenai tata kelola BUMDes, terutama mengenai sistem akuntansi pada BUMDes adalah bagian terpenting dalam mengembangkan usaha pada BUMDes itu sendiri dalam menghasilkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan digunakan untuk mengukur unit usaha yang dikelola berkembang atau tidak. Penilaian kinerja keuangan juga dilakukan/diukur untuk mengetahui baik buruknya kondisi keuangan BUMDes yang mencerminkan suatu prestasi kerja pada periode tertentu (Ismaniyah, 2021).

Faktor pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor yang paling penting yang harus dimiliki oleh pelaku BUMDes di dalam menjalankan operasional usaha BUMDes. Sistem akuntansi digunakan sebagai alat kontrol keuangan yang dapat memberikan bantuan yang memadai untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya dan merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Seseorang dapat dikatakan paham terhadap sistem akuntansi adalah seseorang yang pandai dan mengerti bagaimana metode dan prosedur akuntansi untuk mencatat dan melaporkan informasi serta kondisi keuangan yang dimuat dalam laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi.

Namun pada kenyataannya, masih rendahnya sumber daya manusia pada BUMDes di Jembrana yang berkompeten dalam bidang akuntansi tentu akan berdampak pada kinerja keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes itu sendiri sehingga berpengaruh terhadap kondisi BUMDes dan nantinya akan berdampak pada pengambilan keputusan usaha yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang kurang karena masih terdapat beberapa data-data yang tidak sesuai dalam laporan keuangan seperti kesalahan pencatatan transaksi. Maka dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk memetakan pengetahuan pelaku BUMDes dalam hal akuntansi seperti adanya pelatihan dan pendampingan khusus mengenai akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh (Ningseh, 2018) menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya et al., 2022) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Krisdianto & Siahaan, 2021) menunjukkan hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan.

Kemudian keberadaan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan juga berpengaruh dalam menentukan kinerja keuangan pada BUMDes. Pengelolaan merupakan upaya yang dilakukan sebuah perusahaan dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan, pemanfaatan serta pengendalian dana dan aset. Pada kenyataannya, masih rendahnya pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh pelaku BUMDes di Jembrana menyebabkan tidak terkendalinya pemanfaatan dana yang ada pada BUMDes sehingga kegiatan usaha tidak dapat berjalan dengan maksimal dan dapat menyebabkan kegagalan dalam usaha. Pengaruh pengelolaan keuangan pada BUMDes sangatlah penting bagi kelangsungan hidup usaha yang dijalankan. Semakin efisien penggunaan dan pengelolaan dana berarti semakin baik bagi perusahaan (Pertiwi & Pratama, 2012). Melihat permasalahan tersebut maka ketepatan dalam melakukan pengelolaan keuangan pada BUMDes semakin diperlukan demi

terciptanya kelangsungan usaha yang lebih terjaga dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh (D. A. D. Nasution, 2018) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rumain et al., 2021) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Selanjutnya yaitu struktur modal. Pada dasarnya struktur modal merupakan suatu pembiayaan yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing. BUMDes harus mampu membuat struktur modal yang optimal guna memberikan keseimbangan antara risiko dan pendapatan. Pada kenyataannya, masih rendahnya mengenai struktur modal pada BUMDes di Jembrana menyebabkan dana atau modal yang dimiliki beberapa BUMDes belum dapat meminimalisasi risiko keuangan seperti pembiayaan-pembiayaan yang ditimbulkan dari usaha yang dijalankan. Struktur modal yang kurang optimal mempengaruhi kinerja dan meningkatkan risiko kegagalan bisnis (Kristianti, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Kristianti, 2018) menunjukkan hasil bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Syera, 2021) menunjukkan hasil bahwa struktur modal berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh (Sabilla, 2021) menunjukkan hasil bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Selain pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan dan struktur modal, faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada BUMDes yaitu efektivitas kerja karyawan. Suatu instansi atau perusahaan selalu berusaha agar karyawan yang terlibat di dalamnya mampu bekerja secara efektif, karena keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimulai dari keberhasilan masing-masing karyawan yang terlibat dalam instansi tersebut. Namun pada kenyataannya, beberapa BUMDes di Jembrana

masih memiliki beberapa karyawan yang kurang memiliki efektivitas kerja yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya, hal ini dapat dilihat dari beberapa BUMDes yang tidak dapat mengumpulkan informasi laporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Nelson, 2020) menunjukkan hasil bahwa efektivitas kerja berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Syera, 2021) hasil bahwa efektivitas kerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel-variabel yang telah ditentukan yaitu pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, struktur modal dan efektivitas kerja karyawan terhadap kinerja keuangan BUMDes di Kabupaten Jembrana. Alasan dilakukannya penelitian ini yaitu berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu, masih ditemukan perbedaan hasil uji variabel. Hal ini mendasari peneliti untuk menguji kembali variabel tersebut. Adapun teori utama atau *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *stakeholder*. Dimana teori ini menyatakan bahwa suatu perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholdernya* yang dimana dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah desa. Teori *stakeholder* akan membuat entitas berusaha untuk memuaskan para *stakeholdernya* agar tetap bertahan yaitu dengan mengungkapkan informasi akuntansi yang dibutuhkan. Informasi yang diperoleh tersebut harus didasarkan pada sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti pemahaman sistem akuntansi yang baik, pengelolaan keuangan dan struktur modal serta efektivitas kerja yang baik sehingga akan menghasilkan laporan kinerja keuangan sebagai alat yang digunakan mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suatu entitas.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Jembrana, berdasarkan pertimbangan bahwa Jembrana menjadi daerah pertama yang mempunyai BUMDes secara keseluruhan daripada kabupaten lainnya yakni 41 unit BUMDes dari 41 desa serta Kabupaten

Jembrana memperoleh penghargaan sebagai daerah penyalur dana desa tercepat tahap I di Bali, dan adanya kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk BUMDes yang diharapkan untuk dapat memanfaatkan dana desa dalam meningkatkan peran BUMDes. Namun, hal tersebut diiringi dengan banyak BUMDes di Jembrana yang berada dalam kondisi yang kurang baik sehingga menjadi suatu permasalahan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu (Krisdianto & Siahaan, 2021) adalah objek penelitian yang dijadikan tempat penelitian yaitu (Krisdianto & Siahaan, 2021) melakukan penelitian yang memfokuskan pada Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada Kinerja Keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana. Selain itu, perbedaan penelitian ini ingin memperluas penelitian sebelumnya dari (Syera, 2021) yang menguji variabel struktur modal dan efektivitas kerja karyawan terhadap kinerja keuangan BUMDes Mekar Jaya Tanjung Alam dengan menambahkan variabel bebas yaitu pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Struktur Modal Dan Efektivitas Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan usahanya BUMDes, terjadi ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan capaian kerja yang dihasilkan. Hal ini nampak pada keberadaan dan perkembangan jumlah BUMDes serta berbagai kebijakan pendanaan modal untuk

BUMDes yang belum dikelola dengan maksimal sehingga kesediaan modal tidak sejalan dengan kondisi kesehatan usaha BUMDes yang ada saat ini.

2. Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh pengurus BUMDes karena kurangnya pemahaman dan kemampuan yang dimiliki SDM dalam mengelola keuangan dan menyusun struktur modal dengan tepat dan benar pada usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Sehingga masih ditemukan beberapa BUMDes yang tidak melakukan pelaporan mengenai kinerja keuangannya.
3. Kurang optimalnya efektivitas kerja karyawan pada BUMDes di Kabupaten Jembrana dalam memilih sasaran dan tujuan yang tepat yang telah ditetapkan di awal serta terjadinya penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat pada waktunya sehingga menghambat kelancaran aktivitas BUMDes.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan masalah yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan BUMDes. Maka peneliti hanya membatasi permasalahan-permasalahan pada Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Struktur Modal dan Efektivitas Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap kinerja keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimanakah pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana?

3. Bagaimanakah pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana?
4. Bagaimanakah pengaruh efektivitas kerja karyawan terhadap kinerja keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap kinerja keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana.
2. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana.
3. Untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana.
4. Untuk menguji pengaruh efektivitas kerja karyawan terhadap kinerja keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan, wawasan, informasi serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi mereka yang nantinya ingin meneliti atau memperdalam

pengetahuan mengenai Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Struktur Modal dan Efektivitas Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hal – hal yang mempengaruhi kinerja keuangan BUMDes serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbendaharaan perpustakaan Undiksha Singaraja, serta menambah pengetahuan bagi pembaca tentang kinerja keuangan BUMDes.

c) Bagi BUMDes

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang nantinya dapat digunakan oleh BUMDes serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran oleh BUMDes untuk dapat meningkatkan tingkat kinerja keuangan BUMDes yang lebih baik.